

**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng**

***The Effect of Implementation Regional Financial Accounting System, Human Resource Competency and Infrastructure Facilities to the Quality of Financial Report at Social Agency Bantaeng Regency***

Erni<sup>1)</sup> Gunawan<sup>2)</sup> Hasmin<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Mahasiswa, PPs STIE Amkop

email: ernisosial@gmail.com

<sup>2)</sup>Manajemen, PPs STIE Amkop

email: fadelgun@gmail.com

<sup>3)</sup>Manajemen, PPs STIE Amkop

email: hasmintamsah@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumberdaya manusia dan sarana prasarana terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, baik secara parsial maupun secara simultan.

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. Penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder yang bersumber dari informasi di tempat penelitian, jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian dan data primer diperoleh secara langsung dari responden atau yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Jumlah sampel yang digunakan adalah seluruh pegawai yang berjumlah 35 responden. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan melakukan pengujian secara parsial (uji-t) dan pengujian secara simultan (uji-F).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng; 2) Kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng; 3) Sarana prasarana berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng dan 4) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumberdaya manusia dan sarana prasarana berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.

Kata Kunci: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumberdaya Manusia, Sarana Prasarana, Kualitas Laporan Keuangan.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of the implementation regional financial accounting system, human resource competency and infrastructure facilities to the quality of financial report at Social Agency Bantaeng Regency, either partially or simultaneously.*

*This research was conducted at Social Agency Bantaeng Regency Office. The research will be conducted for 3 months. The source of data in this study is a secondary data sourced from information in place of research, scientific journals and books related to the object of research and primary data obtained directly from the respondents or who became the sample in this study. Data analysis in this research use multiple linear regression analysis.*

*The number of samples used is all employees who amounted to 35 respondents. Data analysis used multiple linear regression analysis by performing partial test (t-test) and simultaneous test (F-test).*

*The result of the research shows that 1) The Implementation regional financial accounting system has a positive and significant partially effect on the quality of financial report at Social Agency Bantaeng Regency; 2) The human resources competence has a positive and significant partially effect on the quality of financial report at Social Agency Bantaeng Regency; 3) Infrastructure facilities has positive and significant partially effect on the quality of financial report at Social Agency Bantaeng Regency and 4) Implementation regional financial accounting system, human resource competence and infrastructure facilities have positive and significant simultaneously effect on the quality of financial report at Social Agency Bantaeng Regency.*

*Keywords: Implementation Regional Financial Accounting System, Human Resource Competency, Infrastructure Facilities, Quality of Financial Report.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan organisasi sektor publik merupakan salah satu fenomena dalam konteks akuntansi sektor publik, hal ini bukan saja terjadi di Indonesia namun juga di negara-negara lain (Bastian, 2010). Selanjutnya Bastian menjelaskan tuntutan reformasi ini lebih terkait dengan bidang pengelolaan keuangan publik lebih terfokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan segala hasil pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2009). Sedangkan transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010).

Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan PP 71 Tahun 2010 yaitu (1) relevan, yang berarti informasi harus memiliki *feedback value*, *predictive value*, tepat waktu dan lengkap, (2) andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, verifiability, netralitas, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, (3) dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan entitas lain, (4) dapat dipahami, berarti bahwa informasi

yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap unit atau satuan kerja (Satker) Kementerian atau lembaga dituntut untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing satker (Muzahid, 2014). Menurut (Abidin, 2013) untuk memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan maka Pemerintah mengembangkan sebuah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang hasil laporan keuangannya terlebih dahulu akan diperiksa oleh Inspektorat Daerah sebelum diserahkan ke DPRD.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dilaksanakan oleh propinsi dan kabupaten/kota yang melakukan pemrosesan data transaksi keuangan baik arus uang maupun barang untuk menghasilkan laporan keuangan (Abidin, 2013). Dijelaskan pula oleh bahwa dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah masih terdapat kendala dalam penggunaan SAKD dan penyajian laporan keuangan. Adapun kendala-kendala yang terjadi adalah keterlambatan dalam proses pembuatan, penyampaian laporan keuangan dengan SAKD ke KPPN (Nugroho, 2012). Hal ini dipengaruhi oleh masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta masih kurangnya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pengelola keuangan.

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas (Wati et al., 2014). Juga menjelaskan bahwa keberhasilan suatu entitas dipengaruhi juga oleh kompetensi sumber daya yang dimilikinya. Kompetensi merupakan ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Hevesi, 2005 dalam Indriasari dan Nahartyo, 2008). Menurut Wahyono (2004) dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (keterandalan) ada dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkannya. Dijelaskan pula bahwa informasi yang dihasilkan melalui laporan keuangan harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan keyakinan bahwa informasi ini benar atau valid.

Menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau menghasilkan informasi tersebut dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya di bidang akuntansi. Sumber Daya Manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan secara efektif, efisien dan ekonomis, dalam arti informasi yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga (Wati et al., 2014). Maka dengan adanya kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia diharapkan laporan keuangan dapat disajikan dan diselesaikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009).

Faktor selanjutnya adalah ketersediaan Sarana prasarana, adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan untuk tercapainya visi dan misi, karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya penerapan standar akuntansi pemerintah berjalan dengan efektif.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan kualitas laporan keuangan diantaranya dilakukan oleh Patra et al (2015), yang menjelaskan bahwa dari hasil pengujian tersebut  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,818 > 2,068$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan kata lain berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Megawati et al. (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara parsial penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) secara simultan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan

pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Rahayu et al. (2014), dari hasil penelitiannya juga menyimpulkan Kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru. Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru.

Sartika (2015) dengan hasil pengujian hipotesis yang membuktikan bahwa variabel ketersediaan sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singing. Hal ini dikarenakan belum tepatnya penggunaan sarana dan prasarana, kurangnya pelatihan mengenai teknologi dan terbatasnya anggaran bagi pengembangan teknologi informasi itu sendiri. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008), dengan hasil penelitian bahwa Laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dengan ketersediaan sarana dan prasarana mengalami peningkatan kualitas yaitu telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional telah memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dipahami dengan baik.

Berdasarkan fenomena, kajian teori serta penelitian sebelumnya yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng?.
2. Apakah kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng?.
3. Apakah sarana prasarana berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng?.
4. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumberdaya manusia dan sarana prasarana berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng?.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sarana prasarana terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumberdaya manusia dan sarana prasarana terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.

# **II. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

## **A. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Pengertian akuntansi sebagaimana dikemukakan oleh *Accounting Principle Board* (APB) yang memandang akuntansi dari sudut fungsinya sebagai berikut: Menurut Halim (2002:138) "Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan".

Akuntansi menyediakan informasi yang kuantitatif yang bersifat keuangan, dengan demikian output akuntansi adalah informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut lebih dikenal dalam bentuk laporan keuangan. Informasi dari akuntansi keuangan daerah tentu saja digunakan oleh Pemerintah Daerah sendiri (internal), juga oleh pihak di luar Pemda (eksternal), seperti DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan.

Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Organisasi bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi telah diatur dalam standar akuntansi maka organisasi harus merancang sistem akuntansinya yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam standar akuntansi untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi.

Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001:1) "Sistem akuntansi keuangan secara sederhana adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan".

## **B. Kompetensi Sumberdaya Manusia**

Menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2008) Kompetensi merupakan dimensi perilaku yang berada di belakang kinerja kompeten. Sering dinamakan kompetensi perilaku karena dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana orang berperilaku ketika mereka menjalankan perannya dengan baik.

McAshan dalam Sudarmanto (2009) kompetensi merupakan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki seseorang, yang menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia bisa menjalankan penampilan kognisi, afeksi, dan perilaku psikomotorik tertentu.

Pengertian dan arti kompetensi menurut Lyle Spencer & Signe Spencer dalam Moeheriono (2010) adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu (*A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion referenced effective and or superior performance in a job or situation*). Berdasarkan dari definisi tersebut, maka beberapa makna yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut:

- Karakteristik dasar (*underlying characteristic*) kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan.
- Hubungan kausal (*causally related*) berarti kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang, artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan mempunyai kinerja tinggi pula (sebagai akibat).
- Kriteria (*criterion referenced*) yang dijadikan sebagai acuan, bahwa kompetensi secara nyata akan memprediksikan seseorang dapat bekerja dengan baik, harus terukur dan spesifik atau terstandar.

Kemudian Wibowo (2007) mengatakan kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.

Dari berbagai pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan menjalankan tugas atau pekerjaan dengan dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan didukung oleh sikap yang menjadi karakteristik individu.

## **C. Sarana Prasana**



Pekerjaan kantor yang padat membutuhkan dukungan sarana yang memadai. Sarana kantor sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan atau aktivitas kerja yang mempunyai fungsi dan peran dalam mencapai tujuan. Istilah sarana kantor mengandung makna sebagai sesuatu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan secara langsung untuk mencapai tujuan.

Sarana kantor sangat berperan penting dalam proses pelaksanaan kegiatan kantor. Sarana kantor sebagai alat atau benda bergerak yang secara langsung digunakan dalam proses penyelesaian tugas dan pekerjaan kantor. Hal tersebut juga disampaikan oleh Sri Endang R, Sri Mulyani dan Suyyety (2010) yang menyatakan Sarana kantor itu lebih ditujukan untuk benda-benda bergerak seperti komputer dan mesin-mesin".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) pengertian "Prasarana adalah segala yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses". Definisi tersebut, dapat diartikan prasarana merupakan fasilitas tempat (barang tidak bergerak) yang digunakan untuk menunjang sarana kantor dalam mencapai tujuan usaha atau organisasi.

Hal ini juga didukung oleh pendapat Endang, Mulyani dan Suyetty (2010) yang menyatakan "Prasarana kantor itu lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang, dan tanah". Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 juga menjelaskan bahwa: Prasarana kerja kantor adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Priansa (2013) yang menyatakan "Sarana kantor berarti alat langsung yang digunakan untuk melaksanakan proses kegiatan kantor". Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 juga menjelaskan bahwa Sarana kerja adalah suatu fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.

Prasarana ini merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan yang sifatnya permanen atau tetap seperti gedung, lapangan, aula dan sebagainya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli maka dapat diambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan proses kegiatan kantor yang bersifat permanen atau tetap. Contoh prasarana kantor seperti tanah, gedung, dan ruang kantor. Berdasarkan beberapa pendapat ahli maka dapat diambil ke simpulan bahwa sarana kantor merupakan sesuatu fasilitas pelengkap berupa barang atau benda bergerak yang secara langsung dapat digunakan untuk memudahkan pelaksanaan proses kantor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh sarana kantor seperti meja, kursi, tempat penyimpanan dokumen, mesin-mesin kantor, peralatan/perlengkapan kantor dan lain sebagainya.

#### **D. Kualitas Laporan Keuangan**

Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Obaidat, 2007; Alim et al., 2007). Atril dan McLaney (1991) dalam Saidin (2007) menyebutkan kriteria yang harus dimiliki oleh pelaporan keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna, diantaranya adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dimengerti, tepat waktu dan biaya/manfaat. Ditegaskan bahwa relevan dan dapat diandalkan dari pelaporan keuangan dapat membantu dalam menghasilkan informasi yang bermanfaat, namun jika laporan keuangan tidak dapat dibandingkan, tidak dapat dimengerti dan tidak tepat waktu, biaya yang lebih besar dari manfaat maka akan mengurangi manfaatnya.

Pembuatan laporan keuangan di sektor pemerintahan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas

aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan wajib melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan, serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan berikut.

1. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, serta ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi mendatang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Informasi akuntansi dapat digunakan dalam mengawasi dan menjalankan kontrak politik, ekonomi dan sosial (Chan, 2003). Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami menurut Schiavo-campo dan Tomasi (1999) dalam Mardiasmo (2011).

Agar dapat memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada saat ini, pemerintah di Indonesia sudah mempunyai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP Nomor 24 tahun 2005 menjadi PP Nomor 71 tahun 2010). Di dalamnya terdapat Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang memuat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Karakteristik kualitatif itu dapat diartikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas laporan keuangan yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, laporan keuangan pemerintah perlu memenuhi empat karakteristik berikut (PP 24/ 2005 menjadi PP 71/ 2010).

## E. Penelitian Terdahulu

1. Patra et al. (2015), dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari hasil pengujian tersebut  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,818 > 2,068$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan kata lain

- berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Megawati et al. (2015), dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
  3. Rahayu et al. (2014), dengan judul penelitian Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru. Kemudian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru.
  4. Humairoh (2013) dengan judul penelitian "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Jember)". Hasil penelitian menggunakan uji-t menyatakan bahwa ada pengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Jember. Dengan arti lain apabila variabel kompetensi SDM mengalami peningkatan maka kualitas laporan keuangan pada bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember akan meningkat.
  5. Sartika (2015) dengan judul penelitian "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pengetahuan Pengelola dan Ketersediaan Sarana Prasarana terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Kuantan Singingi)". Hasil ini menunjukkan dua variabel mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan hanya satu variabel yang tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan Dua variabel yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi (SAP), dan manajer pengetahuan. Sedangkan ketersediaan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
  6. Nugraheni dan Subaweh (2008), dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil menunjukkan, tanpa penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana diperoleh angka konstanta peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sebesar 46.650. Setiap penambahan satu satuan penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana akan berpengaruh meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0.385 satuan, 0.252 satuan, dan 0.399 satuan secara berturut-turut. Artinya pengaruh penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana.

#### **F. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah, kajian teori, dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian diajukan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.
3. Sarana prasarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.



4. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, mulai November 2017 sampai Januari 2018.

#### B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. Mengingat jumlah populasi relative kecil, sehingga sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode sensus/total sampling dengan pertimbangan bahwa jumlah tersebut dapat dijangkau oleh peneliti. Jumlah personil sebanyak 35 pegawai, sehingga jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 35 pegawai.

#### C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tentang sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah, maka digunakan teknik angket yang terstruktur. Alat pengumpul data dalam penelitian sering disebut dengan instrumen penelitian. Instrumen digunakan untuk mengungkap data mengenai variabel yang diteliti meliputi sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumberdaya manusia dan kualitas laporan keuangan.

#### D. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan validitas internal, karena peneliti ingin mengetahui valid atau tidaknya instrumen atas dasar kevalidan soal tiap butir dengan mengembangkan teori-teori yang ada. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai  $r$ -hitung yang merupakan nilai dari  $\text{Corrected item - Total Correlation} > 0,30$  (Priyatno, 2009) dan begitupun sebaliknya.

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan komputer menggunakan program *SPSS for Windows* Versi 16. Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai  $\alpha$  melebihi 0,6 maka pertanyaan variabel tersebut reliabel dan sebaliknya (Ghozali, 2001).

#### E. Teknik Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan Model regresi linear berganda. Model regresi linier berganda ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh tiga variabel independen terhadap satu variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan. Independen variable (variabel bebas) adalah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi SDM dan Sarana Prasarana.

#### F. Definisi Operasional Variabel

##### 1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengukuran variabel menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Nurillah dan Muid (2014). Jumlah item pertanyaan adalah 8 item dengan skala Likert 1-5. Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan diukur dengan indikator yaitu:

1. Kesesuaian sistem dengan SAP (X1.1)
2. Pengidentifikasian transaksi (X1.2)
3. Pencatatan transaksi (X1.3)
4. Bukti disetiap transaksi (X1.4)
5. Pencatatan kronologis (X1.5)
6. Pengklasifikasian transaksi (X1.6)
7. Laporan keuangan setiap periode (X1.7)
8. Pelaporan yang konsisten dan periodik (X1.8)

## 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengukuran variabel menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Xu et al. (2003). Item-item pertanyaan disesuaikan dengan konteks pemerintah daerah. Jumlah item pertanyaan adalah 7 item dengan skala Likert 1-5. Indikator yang digunakan yaitu:

1. Pemahaman tentang akuntansi (X2.1)
2. SDM yang berkualitas (X2.2)
3. Sumber daya yang memadai (X2.3)
4. Peran dan tanggung jawab (X2.4)
5. Pelatihan keahlian dalam tugas (X2.5)
6. Sosialisasi peraturan baru (X2.6)
7. Pemahaman tentang struktur organisasi (X2.7)

## 3. Sarana Prasarana

Menurut pengertian yang didasarkan kepada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 Sarana dan Prasarana adalah Sarana dan Prasarana fasilitas yang secara langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan suatu proses kerja aparatur pemerintahan daerah dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Indikatornya yaitu:

1. Kondisi Bangunan (X3.1)
2. Ketersediaan sarana prasarana (X3.2)
3. Kondisi sarana prasarana (X3.3)
4. Faktor keamanan peralatan kerja (X3.4)
5. Penggunaan peralatan kerja (X3.5)

## 4. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Zuliarti (2012), kualitas informasi laporan keuangan daerah diukur dengan delapan indikator, yaitu:

1. Manfaat dari laporan keuangan yang dihasilkan (Y1)
2. Ketepatan pelaporan laporan keuangan (Y2)
3. Kelengkapan informasi yang disajikan (Y3)
4. Penyajian secara jujur (Y4)
5. Isi laporan keuangan dapat diverifikasi (Y5)
6. Keakuratan informasi yang disajikan (Y6)
7. Isi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya (Y7)
8. Kejelasan penyajian informasi dalam laporan keuangan (Y8).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Hasil pengujian validitas pada masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1: Hasil Pengujian Validitas**

No	Variabel	Item	r-hitung	Cut of point	Keterangan
1	Penerapan SAKD (X1)	X1.1	0,868	0,300	Valid
		X1.2	0,886	0,300	Valid
		X1.3	0,849	0,300	Valid
		X1.4	0,800	0,300	Valid
		X1.5	0,911	0,300	Valid
		X1.6	0,846	0,300	Valid
		X1.7	0,788	0,300	Valid
		X1.8	0,821	0,300	Valid
2	Kompetensi SDM (X2)	X2.1	0,904	0,300	Valid
		X2.2	0,826	0,300	Valid
		X2.3	0,862	0,300	Valid
		X2.4	0,872	0,300	Valid

		X2.5	0,804	0,300	Valid
		X2.6	0,835	0,300	Valid
3	Sarana Prasarana (X3)	X3.1	0,917	0,300	Valid
		X3.2	0,880	0,300	Valid
		X3.3	0,879	0,300	Valid
		X3.4	0,891	0,300	Valid
		X3.5	0,833	0,300	Valid
4	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Y1	0,880	0,300	Valid
		Y2	0,806	0,300	Valid
		Y3	0,788	0,300	Valid
		Y4	0,831	0,300	Valid
		Y5	0,832	0,300	Valid
		Y.6	0,733	0,300	Valid
		Y.7	0,815	0,300	Valid
		Y.8	0,786	0,300	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa hasil uji validitas pada masing-masing item/instrument tiap variabel pada penelitian ini, nilai *P Value/ Signifikan* < 0,05 (0,000 < 0,05). Artinya bahwa, keseluruhan *item/instrument* pada masing-masing variabel dikatakan valid, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Hasil pengujian reliabilitas pada masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2: Hasil Pengujian Reliabilitas**

No	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Cut of Point
1	Penrapan SKAD (X1)	0,942	0,6
2	Kompetensi SDM (X2)	0,923	0,6
3	Sarana Prasarana (X3)	0,926	0,6
4	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,924	0,6

Sumber: Data Primer diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* berada antara 0,800 sampai dengan 0,889, dimana semua variabel lebih besar dari 0,6 pada taraf signifikan 0,05. Dengan demikian, keempat variabel penelitian ini dapat dinyatakan reliabel, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

## B. Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi dari model penelitian disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3: Hasil Pengujian Koefisien Determinasi**

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,979	0,958	0,954	1,418

Sumber: Data Primer diolah, 2018.

Berdasarkan pada tabel 3, diperoleh nilai koefisien determinasi R-Square menunjukkan nilai sebesar 0,954 atau 95,4%. Artinya bahwa variabel kualitas laporan keuangan dipengaruhi sebesar 95,4% oleh penerapan SAKD (X1), kompetensi SDM (X2) dan sarana prasarana (X3), sedangkan sisanya ( $100\% - 95,4\% = 4,6\%$ ) yaitu 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini.

## C. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, pengujian terhadap hipotesis menggunakan analisis regresi berganda secara parsial maupun simultan. Dari hasil analisis regresi terhadap pengujian pengaruh penerapan SAKD, Kompetensi SDM dan sarana prasarana terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4: Hasil Analisis Regresi**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.368	1.037		3.249	.003
Penerapan SAKD (X1)	.262	.101	.308	2.602	.014
Kompetensi (X2)	.277	.135	.229	2.049	.049
Sarana Prasarana(X3)	.645	.173	.462	3.728	.001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber: Data Primer diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4, maka diperoleh model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 3,368 + 0,262X1 + 0,277X2 + 0,645X3 + e$$

Dimana:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X1 = Penerapan SAKD

X2 = Kompetensi SDM

X3 = Sarana Prasarana

e = error

Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**a) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)**

Pada variabel Penerapan SAKD (X1) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,602 dengan signifikansi  $t$  sebesar 0.014. Adapun  $t_{tabel}$  dalam penelitian ini yakni sebesar 2,039 ( $df = n-k$ , dimana  $n$  = jumlah sampel dan  $k$  adalah jumlah variabel). Dikarenakan  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,602 > 2,039$ ) atau signifikansi  $t$  lebih kecil dari 5% ( $0.014 < 0.05$ ), maka secara parsial Penerapan SAKD (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Berdasarkan atas nilai koefisien regresi standardize (0,308) bertanda positif, mengindikasikan pengaruhnya positif. Artinya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga dapat disimpulkan "Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng".

**b) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)**

Pada variabel kompetensi SDM (X2) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,049 dengan signifikansi  $t$  sebesar 0.049. Adapun  $t_{tabel}$  dalam penelitian ini yakni sebesar 2,039 ( $df = n-k$ , dimana  $n$  = jumlah sampel dan  $k$  adalah jumlah variabel). Dikarenakan  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,049 > 2,039$ ) atau signifikansi  $t$  lebih kecil dari 5% ( $0,049 < 0,050$ ), maka secara parsial kompetensi SDM (X2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Berdasarkan atas nilai koefisien regresi standardize (0,229) bertanda positif, mengindikasikan pengaruhnya positif. Artinya kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga dapat disimpulkan "Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara

kompetensi sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng”.

#### c) Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Pada variabel sarana prasarana (X3) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,728 dengan signifikansi  $t$  sebesar 0.001. Adapun  $t_{tabel}$  dalam penelitian ini yakni sebesar 2,039 ( $df = n - k$ , dimana  $n$  = jumlah sampel dan  $k$  adalah jumlah variabel). Dikarenakan  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3,728 > 2,039$ ) atau signifikansi  $t$  lebih kecil dari 5% ( $0.001 < 0.050$ ), maka secara parsial sarana prasarana (X3) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Berdasarkan atas nilai koefisien regresi standardize (0,462) bertanda positif, mengindikasikan pengaruhnya positif. Artinya sarana prasarana berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga dapat disimpulkan “Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sarana prasarana terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng”.

#### d) Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Tabel berikut akan menyajikan hasil perhitungan SPSS:

**Tabel 5: Hasil Uji Signifikansi secara Simultan**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1410.636	3	470.212	233.843	.000 <sup>a</sup>
Residual	62.335	31	2.011		
Total	1472.971	34			

a. Predictors: (Constant), Sarana Prasarana (X3), Kompetensi SDM (X2), Penerapan SAKD (X1).

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber: Data Primer diolah, 2018.

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.15 di atas, didapatkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 233,843 (signifikansi  $F = 0.000$ ). adapun nilai  $F_{tabel}$  dalam penelitian ini yakni sebesar 2,91 ( $df_1 = n - k$  dan  $df_2 = k - 1$ ). Dengan demikian,  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $233,843 > 2,91$ ) atau  $Sig. F < 5\%$  ( $0.000 < 0.050$ ). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas yang terdiri dari penerapan SAKD (X1), kompetensi SDM (X2) dan sarana prasarana (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan (Y). Hal ini berarti apabila penerapan SAKD (X1), kompetensi SDM (X2) dan sarana prasarana (X3) dapat ditingkatkan secara bersama-sama maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. Begitupun sebaliknya jika penerapan SAKD (X1), kompetensi SDM (X2) dan sarana prasarana (X3) menurun secara bersama-sama maka akan mengakibatkan penurunan kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.

#### **Pengaruh Penerapan SAKD, Kompetensi SDM dan Sarana Prasarana terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil uji secara simultan dengan uji-F dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan SAKD, kompetensi SDM dan sarana prasarana secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap



kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. Artinya bahwa, apabila penerapan SAKD, kompetensi SDM dan sarana prasana naik secara bersama-sama, maka kualitas laporan keuangan akan semakin naik, begitupun sebaliknya apabila penerapan SAKD, kompetensi SDM dan sarana prasana turun secara bersama-sama, maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin turun.

Penilaian kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (Patra et al., 2015 dan Megawati et al., 2015), kompetensi sumberdaya manusia (Rahayu et al., 2014) dan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana (Sartika, 2015 dan Nugraheni dan Subaweh, 2008). Dengan demikian, jelas bahwa untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang lebih baik, kolaborasi antara penerapan SAKD, kompetensi SDM dan sarana prasarana tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari kualitas laporan keuangan sehingga pencapaian tujuan dari penyusunan laporan keuangan yang menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dimana tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng secara umum sudah baik jika dilihat dari

dukungan sistem penerapan SAKD, kemampuan pegawai dalam menjalankan sistem serta ketersediaan sarana prasarana kerja.

Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta. Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan sektor publik menurut *Government Accounting Standard Board* (2009) adalah sebagai berikut:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya.
2. Melaporkan hasil operasi.
3. Melaporkan kondisi keuangan.
4. Melaporkan sumberdaya jangka panjang.

SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng diharapkan mempertahankan serta meningkatkan kualitas laporannya dengan mengatasi kendala-kendala serta kekurangan-kekurangan yang selama ini terjadi. Fokus perhatian pimpinan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah pada sistem penerapan SAKD, kompetensi SDM dan ketersediaan sarana prasarana. Juga masih perlu mengkaji faktor-faktor lain untuk lebih memperkuat kualitas laporan keuangan, misalnya pada sistem pengendalian internal agar kualitas laporan menjadi lebih akurat.

### **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil uji secara parsial dengan uji-t dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan SAKD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, yang artinya jika nilai penerapan SAKD naik maka akan diikuti dengan naiknya kualitas laporan keuangan, demikian sebaliknya jika nilai penerapan SAKD turun maka akan diikuti dengan turunnya nilai kualitas laporan keuangan.

Beberapa peneliti sebelumnya juga telah melakukan penelitian yang temuannya sejalan dengan hasil penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan Patra et al. (2015) menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut juga diperkuat dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Megawati et al (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001) "Sistem akuntansi keuangan secara sederhana adalah suatu sistem in formasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan". Sehingga dapat disederhanakan bahwa SAKD merupakan suatu prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan juga untuk pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan daerah.

Hasil-hasil penelitian tersebut di atas juga didukung oleh pendapat ahli di antaranya, menurut (Mardiasmo, 2009) mengemukakan hubungan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kinerja Instansi Pemerintah yaitu sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.

Selanjutnya menurut (Mardiasmo, 2008) menyatakan Kinerja Pemerintah Daerah akan tercapai dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai.

### **Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil uji secara parsial dengan uji-t dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, yang artinya jika kompetensi SDM yang menjalankan sistem akuntansi keuangan naik maka akan diikuti dengan naiknya kualitas laporan keuangan, demikian sebaliknya jika kompetensi SDM yang menjalankan sistem akuntansi keuangan turun maka akan di ikuti dengan turunnya kualitas laporan keuangan.

Beberapa peneliti sebelumnya juga telah melakukan penelitian yang temuannya sejalan dengan hasil penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Megawati et al. (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang sama dilakukan oleh Humairoh (2013) dengan Hasil penelitian menggunakan uji-t menyatakan bahwa ada pengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Jember. Dengan arti lain apabila variabel kompetensi SDM mengalami peningkatan maka kualitas laporan keuangan pada bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jember akan meningkat.

Penelitian tersebut juga didukung dengan pendapat ahli diantaranya menurut Spencer (dalam Wibowo, 2007: 87) juga mengatakan bahwa kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku atau berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu yang cukup lama. Juga menurut Mangkunegara (2012) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya.

### **Pengaruh Sarana Prasarana terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

hasil uji secara parsial dengan uji-t dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana prasarana memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, yang artinya jika ketersediaan sarana prasarana kerja pegawai naik maka akan diikuti dengan naiknya kualitas laporan keuangan, demikian sebaliknya jika sarana prasarana kerja pegawai turun maka akan di ikuti dengan turunnya kualitas laporan keuangan.

Beberapa peneliti sebelumnya juga telah melakukan penelitian yang temuannya sejalan dan ada juga yang bertentangan dengan hasil penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2015) menemukan bahwa ketersediaan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) yang mana hasilnya sejalan dengan penelitian ini bahwa variabel materi sarana prasarana mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Penelitian-penelitian di atas juga didasari atas beberapa pendapat ahli, diantaranya menurut Priansa (2013) yang menyatakan "Sarana kantor berarti alat langsung yang digunakan untuk melaksanakan proses kegiatan kantor". Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 juga menjelaskan bahwa Sarana kerja adalah suatu fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.
2. Kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.
3. Sarana prasarana berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.
4. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumberdaya manusia dan sarana prasarana berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.

## VI. REFERENSI

- Abdul Halim, 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama, Salemba empat, Jakarta.
- Abidin, Ardan. 2013. Pengaruh Penarapan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Komisi Pemilihan Umum Prov. Gorontalo, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Alim, M. N., Hapsari, T., dan Purwanti, L. 2007. "Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi". Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Arikunto, S., 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Chan, Syafruddin. 2003. Relationship Marketing: Inovasi Pemasaran yang Membuat Pelanggan Bertekuk Lutut, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Depdiknas, 2008, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Gramedia Pustaka Indonesia.
- Duwi, Priyanto. 2009. Belajar Olah Data Dengan SPSS 17. Yogyakarta: ANDI.
- Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Humairoh, Dian Iftitah, 2013. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Jember). ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA Universitas Jember, 2013.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan

- Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI. 23-24 Juli. Pontianak.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andy Offset.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andy Offset.
- Megawati, Luh Kadek Sri, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Edy Sujana, 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng). e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015).
- Moeheriono. 2014. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Edisi Revisi Jakarta: Rajawali Pers.
- Muzahid, Mukhlisul. 2014. Pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kab. Aceh Utara.
- Nugraheni, Purwaniati dan Imam Subaweh, 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 13, April 2008.
- Nugroho, Rahman Adi. 2012. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). Jurnal Undip Semarang.
- Obaidat, Ahmad N. 2007. Accounting Information Qualitative Characteristic Gap: Evidence from Jordan. International Management Review Vol.3 No.2 2007. Diakses 26 Juli 2017 jam 9:09 AM. <http://www.usimr.org/IMR-2-2007/v3n207-art3.pdf>.
- Patra, A. Dahri Adi, Lanteng Bustami dan Hasriani, 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi, Vol. 02 No. 01 Februari 2015.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Priansa, D. J., 2014. Perencanaan & Pengembangan SDM. Bandung: Alfabeta.
- Rahayu, Liza, Kennedy dan Yyuneita Anisma, 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). JOM FEKON Vol. 1 Nomor. 2 Oktober 2014.
- Saidin, Saidatur Fauzi. 2007. Audit Committee Characteristics and Quality of Unaudited Financial Accounts. Diakses 10 Juni 2017 jam 11:28 AM.
- Sartika, Dewi, Zulbahridar dan Lila Anggraini, 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pengetahuan Pengelola dan Ketersediaan Sarana Prasarana terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Kuantan Singingi). Jom FEKON Vol.2 No.2 Oktober 2015.
- Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyono, Teguh, 2004 Sistem Informasi (Konsep Dasar, Analisis, Desain dan Implementasi. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wati, Kadek Desiana, et al. (2014) Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1).
- Wibowo, 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta. Penerbit: Rajagrafindo Persada.
- Xu, Hongjiang, Jeretta H.N, G. Daryl Nord, Binshan Li., 2003. Key Issues of Accounting Information Quality Management: Australian Case Studies. Vol. 103 Iss: 7, pp. 461-470. Tersedia: <http://www.emeraldinsight.com>.

Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas MuhMuria Kudus. Diunduh dari ([http://eprints.umk.ac.id/602/10/skripsi\\_penuh.pdf](http://eprints.umk.ac.id/602/10/skripsi_penuh.pdf)).